

STRATEGI FLA MENDORONG NESTLÉ MELAKUKAN CSR DALAM BIDANG PEKERJA ANAK DI PANTAI GADING PADA TAHUN 2012-2017

Vivi Alvina¹⁾, I Made Anom Wiranata²⁾, Putu Titah Kawitri Resen³⁾

¹²³⁾Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana

Email: vivialvinaliu@gmail.com¹⁾, anomwiranata@gmail.com²⁾, kawitriresen@unud.ac.id³⁾

ABSTRACT

This research aims to describe the strategy of a non-governmental organization, named the Fair Labor Association (FLA) to encourage Nestlé to make behavioral changes by using qualitative methods. The problem of child labor in Ivory Coast has become a complicated issues that need to be solved. As one of the largest food companies in the world and for supplying cocoa from the Ivory Coast, Nestlé has an important role in combating child labor issues. However, Nestlé has not been able to reduce the number of child labor in Ivory Coast. Therefore, the researcher uses the conceptual framework of private authority theory and the strategy of non-governmental organizations in encouraging companies to do Corporate Social Responsibility (CSR). This research can then see that FLA's auditing and reporting strategies can help Nestlé and Ivory Coast reduce child labor numbers and create a better life for the society than before.

Keywords: Ivory Coast, Child Labor, Private Authority, NGO Strategy.

1. PENDAHULUAN

Isu pekerja anak telah menjadi kekhawatiran dunia terutama di negara-negara dengan pendapatan per kapita rendah atau *lower middle-income economies*. Menurut data dari *International Labor Organization* (ILO), sebuah organisasi yang menangani isu pekerja anak di seluruh dunia, Afrika merupakan wilayah dengan jumlah pekerja anak terbanyak di dunia pada tahun 2016 sekitar 72.1 juta anak menjadi pekerja anak dan 31.5 juta anak berpartisipasi dalam pekerjaan yang berbahaya (ILO, 2016).

Dalam sistem internasional, beberapa aktor yang memiliki peran penting untuk membantu mengurangi isu pekerja anak selain negara diantaranya ialah organisasi

non-pemerintah dan juga perusahaan multinasional.

Dalam permasalahan pekerja anak di Afrika, sebuah organisasi non-pemerintah internasional yang bergerak memerangi isu perbudakan pekerja ialah *Fair Labor Association* (FLA). Selain organisasi non-pemerintah, aktor lain yang memiliki peran penting dalam menangani isu pekerja anak ialah perusahaan multinasional dikarenakan setiap perusahaan memiliki kode etik tentang isu pekerja anak yang telah diatur oleh perusahaan dan juga *United Nations Children's Fund* (UNICEF) yang merupakan organisasi PBB yang memberikan bantuan kepada anak-anak terutama di negara-negara berkembang.

Salah satu perusahaan multinasional ternama yang bergerak pada bidang makanan khususnya pada pertanian kakao di Afrika ialah Nestlé. Nestlé mendapatkan kritik dari organisasi non-pemerintah dan juga media mengenai penanganan isu pekerja anak yang sangat lambat dalam rantai pasokannya, Nestlé akhirnya memutuskan untuk bekerja sama dengan FLA pada tahun 2011 untuk bersama-sama memberantas isu pekerja anak khususnya di Pantai Gading.

Pemeriksaan pertama pada rantai pasokan Nestlé mengenai CSR *The Cocoa Plans* oleh FLA dilakukan di Afrika khususnya di Afrika Barat pada tahun 2012. Adapun hasil yang telah ditemukan oleh FLA ialah sebanyak 1.8 juta pekerja anak yang tidak menerima gaji dan dipaksa bekerja selama 14 jam sehari serta berisiko mengalami pelecehan melalui pekerja anak yang sangat berbahaya. Banyak anak-anak yang terlihat dicambuk, dipukuli, dan kakinya akan diiris apabila mereka mencoba melarikan diri dari pekerjaan. Hal ini menjadi perhatian khusus sehingga FLA menilai bahwa Nestlé telah melanggar kode etik perusahaannya sendiri yang mencakup klausul mengenai pekerja anak, keselamatan, dan jam kerja. Walaupun isu pekerja anak ini ditemukan pada rantai pasokannya, Nestlé dinilai tidak memeriksa rantai pasokannya dengan baik secara langsung sehingga Nestlé juga memiliki tanggung jawab moral untuk memberantas isu ini sebagai sebuah perusahaan multinasional.

Beberapa langkah dan program telah dilakukan oleh Pemerintah Pantai Gading

dalam mengurangi isu pekerja anak. Sejak 2009, pemerintah telah melaksanakan inisiatif “Desa Swadaya” dengan membangun sekolah dan memperkenalkan CLMRS atau *Child Labor Monitoring and Remediation System*. Walaupun berbagai upaya dan program telah dicanangkan oleh pemerintah Pantai Gading, program-program tersebut masih belum menjangkau 3.608 komunitas penghasil kakao. Pemerintah Pantai Gading juga kekurangan program yang memadai untuk menangani isu pekerja anak yang terlibat dalam pekerjaan berat. (Finding The Worst Forms Of Child Labor, 2011)

Kerja sama antara FLA dan Nestlé menjadi sebuah langkah untuk membantu Pemerintah Pantai Gading dalam menangani isu ini. FLA yang mengadopsi standar ketenagakerjaan dari ILO memiliki 10 kewajiban perusahaan yang telah diuraikan dalam *FLA Charter*. FLA akan melatih staf untuk memantau dan memperbaiki permasalahan dengan melakukan pemantauan secara internal dan menyediakan pelaporan dalam jangka waktu tertentu (FLA Affiliates, 2008). Sebelum bekerja sama dengan Nestlé, FLA telah berhasil bekerja sama dengan perusahaan besar dunia seperti Nike, Adidas, dan lainnya. CSR atau *Corporate Social Responsibility* “*The Cocoa Plans*” Nestlé yang sebelumnya telah dibentuk oleh Nestlé pada tahun 2009 ini kemudian difokuskan kembali dengan adanya strategi dan perencanaan yang dicanangkan bersama dengan FLA.

2. KAJIAN PUSTAKA

Literatur pertama berjudul *The Role of NGOs in CSR: Mutual Perceptions Among Stakeholders* yang ditulis oleh Daniel Arenas, Josep M. Lozano, dan Laura Albareda. Dalam tulisannya, Arenas et al., (2009) membahas tentang peran dari organisasi non-pemerintah yang dapat mempengaruhi *Corporate Social Responsibility* (CSR) suatu perusahaan. Arenas et al., (2009) menemukan bahwa perusahaan-perusahaan memandang organisasi non-pemerintah sebagai salah satu pelaku utama yang mampu membawa perubahan perilaku bisnis terutama pendorong CSR suatu perusahaan. Literatur ini membantu Peneliti untuk melihat peran organisasi non-pemerintah dalam CSR yang berhubungan dengan penelitian ini yaitu mendorong Nestlé dalam memfokuskan kembali CSR dalam bidang pekerja anak.

Literatur kedua ditulis oleh Sarah Puspa Sari (2014) yang berjudul *Apple Role through Fair Labor Association (FLA) in Order to Fixing Foxconn's Sweatshop in China*. Dalam tulisannya, Sari (2014) menjabarkan peran dari *Apple* sebagai sebuah perusahaan multinasional bekerja sama dengan *Fair Labor Association* (FLA) untuk memperbaiki praktik *sweatshop* yang terjadi di Shenzhen, China. Literatur ini membantu Peneliti untuk melihat bentuk kerja sama antara FLA dengan perusahaan multinasional lain dalam bidang tertentu.

Literatur ketiga yang digunakan ditulis oleh Jessica F.Green (2010) yang berjudul *Private Standards in the Climate Regime: The Greenhouse Gas Protocol*. Dalam tulisannya, Green (2010) menjelaskan tentang adanya dua organisasi non-

pemerintah dapat menciptakan standar dan mendorong perusahaan-perusahaan multinasional untuk mengadopsi standarnya secara luas. Tulisan ini dapat membantu penulis untuk menggunakan teori otoritas swastanya untuk diaplikasikan dalam penelitian Peneliti mengenai otoritas swasta dari *Fair Labor Association* (FLA) yang dapat mengubah perilaku perusahaan multinasional besar seperti Nestlé.

Teori Otoritas Swasta

Green (2013) dalam bukunya yang berjudul *Rethinking Private Authority: Agents and Entrepreneurs in Global Environmental Governance* mendefinisikan otoritas swasta sebagai situasi yang didalamnya aktor swasta membuat aturan atau menetapkan standar yang diadopsi oleh aktor terkait lainnya dalam politik dunia. Standar tersebut bersedia untuk diadopsi sukarela oleh aktor lainnya dikarenakan sumber legitimasi mengenai keahlian khusus dari otoritas swasta.

Green (2013) menggunakan istilah *potential governors* untuk menyebutkan orang yang memiliki otoritas dan juga istilah *the governed* untuk orang yang mematuhiinya. Implikasi penting dari definisi otoritas swasta tersebut ialah sebagai berikut:

1. Pembuat aturan tidak terbatas hanya dibuat oleh negara tetapi juga dapat dibuat oleh *potential governors* seperti organisasi non-pemerintah, perusahaan swasta, perusahaan multinasional, asosiasi atau jaringan advokasi transnasional dan juga aktor non-negara lainnya terkecuali

organisasi internasional dikarenakan organisasi internasional terdiri dari perwakilan negara yang dapat mengambil keputusan.

2. Otoritas swasta terbatas pada kegiatan dari aktor swasta yang didalamnya mereka membuat aturan, standar, praktik, atau regulasi yang mengatur perilaku pihak lain.

3. Dalam menjalankan otoritasnya, *potential governors* meyakinkan *the governed* untuk mengikuti peraturan yang telah dibuat. *Potential governors* harus memiliki hak otoritas yang sah sehingga *the governed* menyetujui dan dapat mengadopsi peraturannya dan perubahan perilaku tersebut dapat diamati oleh *potential governors*.

4. *The governed* mengubah pola perilakunya berdasarkan peraturan yang telah dibuat secara berkala dan berulang serta sistematis dari waktu ke waktu.

5. Ketika aktor-aktor internasional termasuk negara, memilih untuk menerima aturan atau suatu badan internasional secara sah maka aturan atau badan tersebut kemudian dapat menjadi otoritas.

Kemunculan otoritas swasta merupakan respons terhadap permintaan akan ketertiban dan aturan dari para aktor misalnya perusahaan-perusahaan yang memohon atau melakukan permintaan peraturan dari swasta untuk mencegah risiko peraturan domestik dan internasional, adanya tekanan dari aktivis, atau untuk meningkatkan reputasi mereka. Disini aktor

non-pemerintah atau advokasi tertentu dapat menggunakan peraturan swasta untuk mengatur perusahaan. Tekanan yang diberikan oleh aktor non-pemerintah ini berkontribusi dalam menciptakan peraturan swasta untuk mengatur peraturan seperti permasalahan kehutanan dan praktik ketenagakerjaan. Pemerintah juga seringkali memerlukan otoritas swasta sebagai cara untuk mengurangi biaya transaksi, meningkatkan komitmen yang lebih dapat dipercaya dan menetapkan preferensi kebijakan.

Strategi Organisasi Non-Pemerintah Mendorong CSR

Winston (2017) di dalam tulisannya yang berjudul "*NGO Strategies for Promoting Corporate Social Responsibility*" , mengatakan bahwa organisasi non-pemerintah memiliki setidaknya delapan strategi atau taktik yang berbeda untuk mendorong perusahaan-perusahaan menerima atau melakukan *corporate social responsibility* (CSR), yaitu: dialog yang bertujuan untuk mempromosikan penerapan kode etik sukarela melalui pendekatan CSR; advokasi akuntansi sosial dan skema verifikasi independen ; pengajuan resolusi pemegang saham, dokumentasi mengenai penyalahgunaan kekuasaan dan dipermalukan secara moral; seruan boikot terhadap produk dari perusahaan atau divestasi saham; advokasi mengenai undang-undang pembelian yang selektif; advokasi standar yang diberlakukan pemerintah dan litigasi terhadap kerusakan yang terjadi.

Winston (2017) juga menjelaskan bahwa pendekatan audit dan pelaporan sosial menjadi salah satu strategi dari organisasi non-pemerintah dikarenakan perusahaan tidak dapat memantau kepatuhan terhadap kode etik yang diadopsi secara sukarela sehingga perlu diaudit secara independen dengan teratur oleh auditor luar yang kredibel.

Selain itu, stigmatisasi dan shaming oleh organisasi non-pemerintah juga merupakan salah satu taktik yang dapat digunakan untuk mendorong berjalannya CSR sebuah perusahaan. Winston (2017) mengatakan bahwa perusahaan sangat sensitif terhadap kritik buruk yang berkaitan dengan nama merek dan reputasi perusahaan mengenai praktik lingkungan dan sosial yang tidak baik. Hampir semua organisasi non-pemerintah yang aktif dalam bidang CSR melakukan strategi ini untuk mendorong berjalannya CSR.

3. METODOLOGI

Penelitian menggunakan metode pendekatan kualitatif. Menurut Patton dan Merriam (2009) mengatakan bahwa penelitian kualitatif mengupayakan Peneliti untuk memahami situasi atau jangka waktu tertentu dalam penelitian tersebut tanpa memprediksi kemungkinan di masa depan, mencoba memahami fenomena yang ada dan mengkomunikasikannya melalui penelitiannya. Data-data didapatkan dari berbagai macam material yang berhubungan dengan objek penelitian. Penelitian ini menggunakan unit analisis aliansi internasional melihat pola interaksi

antara aktor-aktor hubungan internasional yang membentuk aliansi yaitu organisasi non-pemerintah FLA dan juga perusahaan multinasional Nestlé yang menyebabkan adanya perubahan perilaku dari Nestlé itu sendiri.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam membantu pemerintah Pantai Gading mengurangi angka pekerja anak di Pantai Gading, Nestlé yang telah didesak oleh masyarakat internasional untuk memeriksa rantai pasokannya pun akhirnya memutuskan untuk melakukan kerja sama dengan salah satu organisasi non-pemerintah yang bergerak dalam bidang tenaga kerja yaitu *Fair Labor Association* atau FLA. Sebagai salah satu strategi FLA mendorong Nestlé untuk melakukan perubahan perilaku, FLA melakukan audit terhadap rantai pasokan Nestlé, memberikan rekomendasi sebagai bentuk kekuasaan otoritas swasta agar Nestlé dapat mewujudkan perubahan perilakunya melalui tanggung jawab perusahaannya atau *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang bernama *Cocoa Plans*, dan kemudian memberikan evaluasi kemajuan sebagai strategi pelaporannya atau reporting.

Investigasi Awal (Strategi Audit) Sebagai Langkah Awal

Salah satu strategi atau taktik dari sebuah organisasi non-pemerintah untuk mendorong perusahaan menerima atau melakukan *corporate social responsibility* (CSR) menurut Winston (2017) ialah dengan pendekatan audit untuk memantau kepatuhan terhadap kode etik yang diadopsi

secara sukarela oleh auditor luar yang kredibel. Dalam kasus ini dapat dilihat bahwa auditor kredibel yang dipilih oleh Nestlé ialah *Fair Labor Association* (FLA). Pada November 2011, FLA membentuk sebuah tim yang terdiri dari 20 orang ahli lokal dan internasional dan ditugaskan untuk melakukan penilaian pada rantai pasokan Nestlé di Pantai Gading.

Adapun fokus dari tim investigasi dalam rantai pasokan kakao Nestlé ialah pekerja anak, efektifitas dari sistem manajemen internal dalam rantai pasokan Nestlé yang berkaitan dengan hak-hak tenaga kerja; dan kepatuhan terhadap standar ketenagakerjaan yang terkandung dalam the *FLA Workplace Code of Conduct and Compliance Benchmarks* atau Kode Etik Tempat Kerja FLA dan Tolak Ukur Kepatuhan.

Adapun kesimpulan dari hasil investigasi awal yang diperoleh melalui audit oleh FLA yaitu, Nestlé sebagai salah satu perusahaan yang memiliki daya pengaruh besar dalam bidang makanan dan memasok volume biji kakao dari Pantai Gading memiliki posisi yang baik untuk memberikan dampak positif bagi para pekerja dalam rantai pasokan Nestlé. Dalam mendukung beberapa program mengenai kakao di Pantai Gading, *Nestlé Cocoa Plan* dan partisipasi dalam inisiatif lain menjadi sebuah landasan yang kuat dan dapat menjangkau lebih dalam. Menurut FLA, *Nestlé Cocoa Plan* dapat diberikan beberapa penyesuaian dan peningkatan untuk menjadi program pengembangan yang lebih menyeluruh dengan peningkatan pemantauan dan

peningkatan akuntabilitas dari berbagai tingkatan pemasok.

FLA juga mengidentifikasi beberapa risiko dalam hal ketenagakerjaan terutama dalam bidang pekerja anak, kerja paksa, kesehatan dan keselamatan, diskriminasi dan kompensasi. Investigasi tersebut juga menemukan cedera yang merajalela terutama penggunaan parang yang mengiris kaki anak-anak saat memanen buah kakao, serta orang dewasa yang bekerja berjam-jam tanpa bayaran. FLA mengklaim adanya bukti mengenai pekerja anak di perkebunan kakao di Pantai Gading selama bertahun-tahun. Pekerja anak yang ditemukan pada perkebunan kakao di Pantai Gading berasal dari berbagai faktor yang berbeda.

Dengan identifikasi ini, FLA mengatakan dalam laporannya bahwa Nestle gagal dalam permasalahan isu pekerja anak. Pernyataan ini juga merupakan salah satu strategi shaming yang diberikan oleh FLA sehingga Nestle mau melakukan perubahan mendalam melalui CSR perusahaannya.

FLA juga mengatakan bahwa dibutuhkannya strategi yang realistis untuk menghapus pekerja anak yang telah lama berakar di Pantai Gading, FLA mengatakan bahwa sebenarnya satu perusahaan saja tidak dapat menyelesaikan semua permasalahan standar tenaga kerja yang berlaku di sektor kakao di Pantai Gading. Dibutuhkannya kontribusi lainnya dari pelaku industri lainnya untuk meningkatkan pemetaan rantai pasokan dan transparansi serta program pemantauan dan peningkatan kapasitas.

Memberikan Rekomendasi Sebagai Otoritas Swasta (FLA) Dalam Bentuk Action Plan

Green (2013) dalam bukunya yang berjudul *Rethinking Private Authority: Agents and Entrepreneurs in Global Environmental Governance* mengatakan bahwa *potential governors* merupakan aktor yang membuat aturan, standar, praktik, atau regulasi yang mengatur perilaku pihak lain. Dalam kasus ini, FLA sebagai suatu otoritas swasta (*potential governors*) yang telah diakui keahliannya, memberikan rekomendasi kepada pemerintah Pantai Gading dan juga kepada Nestlé serta anggota industri lainnya.

FLA memberikan beberapa rekomendasi untuk pemerintah Pantai Gading yaitu: mempertimbangkan untuk mengisi kesenjangan peraturan yang berkaitan dengan standar ketenagakerjaan di sektor pertanian; mempertimbangkan untuk membuat sistem registrasi nasional untuk petani; mempertimbangkan untuk mengembangkan standar keberlanjutan seluruh sektor kakao dengan keterlibatan berbagai pemangku kepentingan.

Selain untuk pemerintah Pantai Gading, FLA memberikan 11 rekomendasi kepada Nestlé dan anggota industri lainnya untuk sama-sama menuntaskan permasalahan pekerja anak di Pantai Gading. Yang pertama ialah *strengthen Nestlé's supplier Code of Conduct*, FLA merekomendasikan Nestlé untuk lebih memperkuat dan memperjelas definisi, tolak ukur, dan indikator kinerja utama untuk setiap elemen kode etik pemasok.

Kedua ialah *increase awareness and understanding about the Nestlé Code of Conduct amongst upstream suppliers*, yang merekomendasikan para pemasok langsung Nestlé hingga pekerja perkebunan untuk memahami Kode etik pemasok Nestlé dan memahami *Nestlé Cocoa Plan* dengan baik.

Yang ketiga ialah, *define clear roles and responsibilities for Nestlé, staff, suppliers, cooperatives and farmers*, yang merekomendasikan agar para staf Nestlé, pemasok, koperasi dan petani dalam rantai pasokan Nestlé untuk lebih meningkatkan kolaborasi internal guna memperkuat peran komite pengawasan *Nestlé Cocoa Plan* di tingkat kantor pusat.

Selanjutnya, rekomendasi keempat FLA ialah *include comprehensive key performance indicators and reporting requirements on labor standards*, rekomendasi ini menyarankan Nestlé untuk memasukkan indikator kinerja utama yang lebih komprehensif dan persyaratan pelaporan untuk standar ketenagakerjaan. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa standar ketenagakerjaan lebih berkualitas dan dapat melaporkan kinerja kepada publik secara transparan kepada staf Nestlé yang mengelola *Nestlé Cocoa Plan*.

Yang kelima ialah, *increase awareness among farmers about the policy of financial premiums*, rekomendasi ini berguna untuk meningkatkan kesadaran petani tentang kebijakan alokasi upah premium dan pentingnya mempertahankan standar sosial sebagai persyaratan minimum. Rekomendasi ini muncul akibat petani yang hanya

mengasosiasikan bahan-bahan dengan kualitas dan kuantitas tanpa memperhatikan aspek sosial yang mendasarinya. Pemeliharaan standar ini juga berguna untuk membuat mereka memenuhi syarat mendapatkan upah yang layak dan dapat secara progresif menentukan langkah kedepannya.

Rekomendasi keenam ialah *develop a robust internal monitoring and remediation system*, rekomendasi ini merupakan rekomendasi paling penting yang direkomendasikan oleh FLA yang menyarankan agar Nestlé perlu mengembangkan sistem pemantauan dan remediasi internal yang lebih kuat dan komprehensif dalam rantai pasokannya. Pemantauan ini mencakup standar tenaga kerja dan pembayaran upah.

Rekomendasi ketujuh ialah *examine the role that cooperatives and other established localities could play as a hub for extension services*, rekomendasi ini menyarankan agar Nestlé dapat membuat sebuah pusat layanan penyuluhan tambahan misalnya produk perlindungan tanaman, layanan informasi bagi petani melalui telepon seluler, kredit atau tabungan mikro, sistem irigasi, teknologi inovatif dan juga pemantauan dan pelaporan yang harus diperiksa secara berkelanjutan.

Selanjutnya, rekomendasi kedelapan ialah *facilitate collaboration and communication between local and international stakeholders*, rekomendasi ini menyarankan agar Nestlé dapat bekerja sama dengan berkolaborasi dan berkomunikasi dengan organisasi lokal dan internasional seperti *International Cocoa*

Initiative, *World Cocoa Foundation*, dan *International Committee of the Red Cross* untuk berbagi informasi, melengkapi upaya dan meningkatkan kinerja program secara keseluruhan. FLA juga menyarankan agar program dengan *International Cocoa Initiative* dapat diperkuat dan ditingkatkan dengan indikator kinerja melalui penilaian dampak sosial.

Rekomendasi kesembilan ialah *scale up efforts for the Nestlé Cocoa Plan in the standard supply chain*, rekomendasi ini menyarankan agar Nestlé dapat meningkatkan tanggung jawab sosialnya yang bernama *Nestlé Cocoa Plan* dengan meningkatkan standar dalam rantai pasokannya.

Selanjutnya, rekomendasi kesepuluh dari FLA ialah *address the issue of child labor through immediate steps involving a bottom-up approach*, rekomendasi ini menyarankan agar *Nestlé Cocoa Plan* dapat menangani permasalahan pekerja anak melalui pendekatan bottom-up yang dapat mencakup aktivitas-aktivitas seperti kampanye mengenai kesadaran di tingkat petani terhadap penggunaan pekerja anak, rehabilitasi kasus-kasus pekerja anak yang teridentifikasi melalui interaksi dengan otoritas lokal yang sesuai dan bekerja dengan organisasi masyarakat sipil internasional maupun lokal untuk merancang strategi jangka pendek dan panjang.

Yang terakhir ialah rekomendasi *create alternative income creation opportunities for farmers and their families*, yaitu rekomendasi yang menyarankan agar Nestlé dapat

melengkapi atau membantu upaya pemerintah untuk menciptakan pendapatan alternatif bagi petani dan keluarganya dalam jangka panjang. Pendapatan alternatif ini dapat berupa pelatihan kejuruan, pembangkit energi lokal dengan buah kakao dan dapat menghubungkan proyek sosial dengan bisnis inti Nestlé.

Dengan mengikuti rekomendasi CLMRS dari FLA, Nestlé menjadi perusahaan pertama dalam industri kakao yang mulai menangani masalah pekerja anak secara komprehensif melalui teknik CLMRS sebagai bagian dari *Nestlé Cocoa Plan* pada tahun 2012. Adapun langkah-langkah dalam pelaksanaan CLMRS (Nestlé Cocoa Plan, 2017) ini yaitu pertama, *Community Liaison Person* (CLP) akan mengunjungi rumah tangga dan pertanian untuk mengumpulkan informasi dasar mengenai permasalahan pekerja anak. Selanjutnya, CLP akan berusaha mencari anak-anak yang sedang bekerja dalam kondisi kerja yang berbahaya. Kemudian, informasi-informasi ini akan masuk ke dalam sistem informasi Nestlé.

Selanjutnya terdapat agen yang bernama *Child Labor Agent* (CLA) yang akan memverifikasi dan memvalidasi semua informasi dan laporan oleh CLP. Selanjutnya, ICI sebagai komunitas yang bekerja sama dengan Nestlé akan menganalisa data-datanya, mengidentifikasi, dan menawarkan aktivitas remediasi kepada penduduk sekitar. Kemudian, ICI dan petinggi di daerah tersebut akan mengimplementasikan atau memberikan dukungan remediasi untuk anak-anak maupun orang tuanya. Yang terakhir, anak-anak akan diawasi atau di monitor sampai

usia 18 tahun sehingga dapat memastikan keefektifan agenda ini.

Dalam program remediasi CLMRS, mengedukasi para ibu di Pantai Gading juga menjadi salah satu agendanya. Selain peningkatan kesadaran terhadap bahaya pekerja anak, Nestlé menganggap edukasi para ibu juga penting dikarenakan dengan memberdayakan perempuan, para ibu dapat membantu anak-anak mereka agar terhindar dari kegiatan bekerja di perkebunan kakao.

Perbaikan pendidikan di Pantai Gading juga dilakukan oleh Nestlé. Daripada mengizinkan anak-anak untuk bekerja di perkebunan kakao, sekolah menjadi tempat yang tepat bagi anak-anak untuk melakukan aktivitas sehari-hari mereka. Untuk mengurangi peluang anak-anak bekerja di perkebunan kakao, salah satu caranya ialah dengan melakukan perbaikan pendidikan. Nestlé memberikan fasilitas akses ke pendidikan dengan menyediakan tambahan sekolah di Pantai Gading.

Selain memberikan fasilitas pendidikan yang lebih layak, terdapat kendala lain yang sering dihadapi oleh anak-anak di Pantai Gading yaitu permasalahan tidak adanya akta kelahiran. Akta kelahiran menjadi salah satu syarat wajib untuk masuk ke jenjang pendidikan menengah. Hal ini dilakukan untuk mendukung anak-anak melanjutkan pendidikan mereka tanpa kendala lainnya. Selain peran dari Nestlé, pemerintah Pantai Gading juga berinisiatif untuk memberikan akta kelahiran dalam skala besar kepada masyarakat yang membutuhkan dan dapat bermanfaat bagi anak-anak di Pantai Gading.

Mengadvokasi Evaluasi Kemajuan Sebagai Strategi Pelaporan (Reporting)

Winston (2017) di dalam tulisannya yang berjudul “*NGO Strategies for Promoting Corporate Social Responsibility*”, menjelaskan bahwa pendekatan audit dan pelaporan sosial menjadi salah satu strategi dari organisasi non-pemerintah untuk mendorong perusahaan melakukan CSR atau *Corporate Social Responsibility*. Hal ini dikarenakan perusahaan tidak dapat memantau kepatuhan terhadap kode etik yang diadopsi secara sukarela sehingga perlu diaudit secara independen dengan teratur oleh auditor luar yang kredibel.

Dalam penelitian ini, auditor luar yang kredibel yang dipilih oleh Nestlé ialah FLA (*Fair Labor Association*). Setelah adanya perubahan perilaku dari Nestlé, FLA juga melakukan pelaporan mengenai kemajuan yang terjadi terhadap kasus pekerja anak di Pantai Gading.

Setiap tahunnya, FLA melakukan pemantauan eksternal secara independen dan memberikan laporan khusus mengenai perubahan yang terjadi dalam rantai pasokan Nestlé. Nestlé sendiri telah mengembangkan *Child Labor Monitoring and Remediation System* (CLMRS) dalam *Nestlé Cocoa Plan*-nya. Untuk memverifikasi dan mengidentifikasi risiko tenaga kerja dan hak asasi manusia dalam rantai pasokan Nestlé, FLA membandingkan kondisi kerja dengan kode etik tempat kerja atau *code of conduct* FLA khususnya di perkebunan kakao.

FLA melaporkan beberapa poin mengenai perubahan yang terjadi dalam rantai pasokan Nestlé di Pantai Gading. Secara garis besar, FLA menyimpulkan bahwa Nestlé telah mengalami beberapa kemajuan. Dalam laporannya (*Fair Labor Association, 2017*), FLA mengungkapkan bahwa Nestlé telah melakukan tindakan remediasi meliputi pembagian perlengkapan sekolah, memfasilitasi akses akta kelahiran, memberikan beberapa kegiatan yang dapat menghasilkan pendapatan bagi perempuan, dan juga mendirikan sekolah untuk anak-anak di Pantai Gading.

Namun, FLA menilai untuk mengatasi masalah pekerja anak, dibutuhkan pembangunan ketahanan ekonomi petani dan pekerja untuk mengurangi perubahan harga kakao. Walaupun Nestlé telah melakukan serangkaian kegiatan untuk mengurangi beberapa permasalahan yang ada, dalam beberapa wawancara dengan para petani masih ditemukan permasalahan dalam menyekolahkan anak-anak mereka.

Dalam temuannya, beberapa anggota masyarakat mengatakan bahwa mereka sadar akan kebijakan pekerja anak dan ingin mematuhiya tetapi mereka kekurangan tenaga kerja. Hal ini disebabkan oleh rendahnya pendapatan kakao, tenaga kerja yang semakin tua, pemuda yang banyak melakukan migrasi ke kota-kota terdekat untuk mendapatkan pendidikan, pekerjaan dan kesempatan kerja yang lebih baik. Alasan-alasan inilah yang membuat para keluarga berhenti menyekolahkan anak-anak mereka dan kembali mempekerjakan mereka. Maka dari itu, kesadaran dari masyarakat di

Pantai Gading harus lebih ditingkatkan lagi dengan program yang berkelanjutan dari Nestlé.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penemuan sebelumnya, Peneliti menemukan bahwa isu pekerja anak di Pantai Gading disebabkan oleh beberapa faktor pendorong yang lebih kompleks yang membuat anak-anak rentan terhadap eksploitasi di perkebunan kakao. Dalam membantu pemerintah Pantai Gading untuk mengurangi jumlah pekerja anak di Pantai Gading, terdapat beberapa aktor penting yang terlibat seperti perusahaan multinasional dan organisasi non-pemerintah.

Dalam penelitian ini, Fair Labor Association (FLA) mendorong Nestlé untuk melakukan CSR dalam bidang pekerja anak demi membantu mengurangi angka pekerja anak di Pantai Gading. FLA, sebuah organisasi non-pemerintah yang bergerak dalam bidang pekerja membuat beberapa strategi untuk mendorong Nestlé sebagai sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang makanan terutama yang berbahan dasar kakao untuk memperbaiki CSR perusahaannya.

FLA menjalankan strategi audit dengan melakukan investigasi pada rantai pasokan Nestlé di perkebunan kakao di Pantai Gading. Kemudian, FLA sebagai aktor swasta yang memiliki otoritas swasta memberikan beberapa rekomendasi yang akan dijalankan oleh Nestlé. Dengan

rekomendasi yang diberikan oleh FLA, Nestlé membuat perubahan perilaku yang dapat dicerminkan melalui CSR Nestlé Cocoa Plan. Strategi yang terakhir ialah dengan melakukan strategi reporting dengan memberikan pelaporan mengenai perubahan perilaku dari Nestlé.

Dengan CSR dari Nestlé serta kerja samanya dengan beberapa pihak seperti pemerintah Pantai Gading, masyarakat lokal, dan juga komunitas yang bergerak dalam bidang pekerja anak, Nestlé dapat memberikan beberapa perubahan dalam kehidupan masyarakat dan anak-anak di perkebunan kakao di Pantai Gading. Walaupun angka pekerja anak di Pantai Gading masih ada, namun, perubahan yang terjadi dan kontribusi yang diberikan oleh Nestlé diharapkan dapat berjalan dan berlangsung secara berkelanjutan demi menekan angka pekerja anak di Pantai Gading.

6. DAFTAR PUSTAKA

- Arenas, D., Lozano, J. M., & Albareda, L. (2009). The Role of NGOs in CSR: Mutual Perceptions Among Stakeholders. *Journal of Business Ethics*, 88(1), 175–197. <https://doi.org/10.1007/s10551-009-0109-x>
- Fair Labor Association. (2017). Independent External Monitoring of Nestlé ' S Cocoa Supply Chain in Ivory Coast. July, 9–12.
- Finding The Worst Forms Of Child Labor. (2011).
- FLA. (2011). Nestlé Taps Fair Labor Association To Map Cocoa Supply Chain, Accelerate Progress In Eliminating Child Labor.

<https://www.fairlabor.org/blog/entry/nestlé-taps-fair-labor-association-map-cocoa-supply-chain-accelerate-progress-eliminating>

FLA. (2012). Nestlé's Cocoa Supply Chain In The Ivory Coast: 2011. <https://www.fairlabor.org/report/Nestlé-s-cocoa-supply-chain-ivory-coast-2011>

Green, J. F. (2010). Private standards in the climate regime: The greenhouse gas protocol. *Business and Politics*, 12(3). <https://doi.org/10.2202/1469-3569.1318>

Green, J. F. (2013). A Theory of Private Authority. *Rethinking Private Authority*. <https://doi.org/10.23943/princeton/9780691157580.003.0002>

Hawksley, H. (2012). Nestlé "failing" on child labor abuse, says FLA report. <https://www.bbc.com/news/world-africa-18644870>

Nestlé. (2009). Nestlé Cocoa Plan Promotes Better Farming , Better Lives , Better Cocoa. 1–4.

Nestlé Cocoa Plan. (2017). Tackling Child Labor: 2017 Report. 53. https://www.Nestlécocoaplanreport.com/sites/default/files/2017-10/NestléCocoaPlanReport2017_EN_0.pdf

Sari, S. (2014). Apple Role Through Fair Labor Association (FLA) in Order to Fixing Foxconn's Sweatshop in China. *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional UNPAR*, 10(2), 98217. <https://doi.org/10.26593/jihi.v10i2.1317>.

Winston, M. (2017). NGO strategies for promoting corporate social responsibility. *Corporate Social Responsibility*, 427–443.